

ABSTRAK

ANALISIS PEMIDANAAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN TUJUAN EKSPLOITASI SEKSUAL (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR: 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk)

Oleh

NISRINA TRI ANDANI

Perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan kejahatan berat yang melanggar hak asasi manusia dan kerap kali melibatkan anak, baik sebagai korban ataupun pelaku. Anak yang menjadi korban tindak pidana ini rentan mengalami trauma fisik dan psikis, baik secara langsung maupun tidak langsung akibat eksploitasi seksual. Namun tidak adanya penjatuhan maksimal terhadap anak pelaku yakni hanya $\frac{1}{2}$ (setengah) ancaman orang dewasa sebagaimana ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tidak terciptanya efek jera dan potensi pengulangan tindak pidana. Sehingga, permasalahan tersebut menarik untuk diteliti untuk mengetahui bagaimanakah pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual dan apakah faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber yang terlibat dalam penelitian ini adalah Hakim Anak Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Dosen Anak Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung. Data primer penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dengan narasumber. Wawancara memungkinkan peneliti untuk menggali informasi dan perspektif yang mendalam dari para ahli. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual dalam Putusan Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk menggunakan teori gabungan antara teori absolut dan teori relatif, pemidanaan terhadap anak dijatuhkan tidak semata-mata sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga bertujuan memberikan efek jera, memperbaiki perilaku anak, serta memberikan manfaat bagi masyarakat dengan mencegah terulangnya tindak pidana serupa; dan (2) Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk hal-hal yang dapat

Nisrina Tri Andani

meringankan hukuman terdakwa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan meliputi: (1) aspek yuridis, yaitu terbuktinya unsur Pasal 76F Jo. 83 Undang-Undang Perlindungan Anak; (2) aspek filosofis, yakni upaya pembinaan dan pemulihan perilaku anak; dan (3) aspek sosiologis, hakim mempertimbangkan usia anak yang masih muda, anak menyesali perbuatannya, bukan tindak pidana pengulangan, latar belakang sosial anak, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Saran yang dapat diberikan adalah agar hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku mempertimbangkan jenis kejahatan, dampak perbuatan tersebut terhadap korban yang juga anak, serta menyeimbangkan keadilan, dan pemulihan bagi anak pelaku dan korban. Selain itu, diharapkan orang tua, pemerintah, masyarakat, dan penegak hukum untuk dapat berperan aktif dalam memberikan pengawasan dan penyuluhan yang dapat membimbing anak agar terhindar dari tindakan melanggar hukum.

Kata kunci: Pidanaan, Anak Pelaku, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Eksploitasi Seksual

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE CRIMINALIZATION OF CHILDREN WHO COMMIT CRIMES OF HUMAN TRAFFICKING FOR THE PURPOSE OF SEXUAL EXPLOITATION

(A Case Study of Decision Number: 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk)

By

NISRINA TRI ANDANI

Human trafficking is a serious crime that violates human rights and often involves children, either as victims or perpetrators. The child as a victim of this crime is vulnerable to physical and psychological trauma, both directly and indirectly due to sexual exploitation. However, there is no maximum sanction for child perpetrators, which is only ½ (half) of the adult threat as stipulated in Article 81 of Law of The Republic of Indonesia Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. This raises concerns about not creating a deterrent effect and the potential for repetition of criminal acts. Hence, this issue is interesting to research and find out on how the criminalization of child perpetrators of trafficking in persons for the purpose of sexual exploitation and the factors that form the basic considerations of judges in handing down verdicts against child perpetrators of trafficking in persons for the purpose of sexual exploitation.

In this research, normative juridical and empirical juridical approaches were used. The resource persons involved in providing this research are Juvenile Judges of Tanjung Karang District Court and Lecturers in Criminal Law Department of University of Lampung. The primary data of research was collected through interviews with resource persons. Interview enables researchers to explore in-depth information and perspectives from experts. The data that has been collected is then analyzed qualitatively.

This research shows that: (1) The sentence against the child perpetrator of the crime of trafficking in persons for the purpose of sexual exploitation in Decision Number: 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk uses a combined theory between absolute theory and relative theory, the sentence against the child is imposed not only as a form of retribution, but also aims to provide a deterrent effect, improve the child's behavior, and provide benefits to society by preventing the recurrence of similar criminal acts; and (2) The judge in imposing the decision considers various factors, including matters that can alleviate the defendant's sentence. The judge's

Nisrina Tri Andani

considerations in making a decision include: (1) juridical aspects, namely the proof of the elements of Article 76F Jo. 83 of the Child Protection Law; (2) philosophical aspects, which are efforts to encourage and rehabilitate children's behavior; and (3) sociological aspects, judges considering the young age of juvenile, the child regretted his actions, not a repeat offender, the child's social background, and benefits for the society.

The recommendation that can be given is for the judge in imposing punishment on child perpetrators to consider the type of crime, the impact of these actions on victims who are also children, as well as balancing justice, and recovery for child perpetrators and victims. In furtherance, it is encouraged that parents, government, community, and law enforcement to play an active role in providing supervision and guidance that can avoid children from offending the law.

Keywords: Criminalization, Child Perpetrators, Human Trafficking, Sexual Exploitation.